

**"Ngapeh Hambat" Obrolan di Awal Tahun  
Pemkab Kukar Evaluasi APBD 2023 dan Persiapan APBD 2024**



*Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,05/2/2024*

**TENGGARONG** – Mengawali program kerja di 2024, untuk lebih memantapkan dan meningkatkan program Kukar Idaman, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menggelar kegiatan rutin bulanan.

“*Ngapeh Hambat*” atau obrolan pagi ini digelar dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan persiapan APBD Tahun 2024, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Tenggarong belum lama ini.

Kegiatan yang dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Dr. Haji Sunggono ini digelar secara langsung maupun daring yang diikuti oleh seluruh para Asisten, Kepala Dinas/OPD, BUMN, para akademisi, pemangku kepentingan, BUMD, para Camat, Kades, Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sunggono mengatakan, banyak pekerjaan yang harus diperbaiki bersama, serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang terpenting di tahun 2024 ini ada peningkatan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN nantinya diminta untuk berkomitmen meningkatkan kinerja pegawai dan beberapa kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, para camat, lurah, kades, dan seluruh *stakeholder* serta masyarakat dalam capaian kinerja 2023.

Kegiatan ini juga sekaligus bagaimana menyikapi kelemahan di tahun 2023 hingga tahun 2024 ini akan lebih baik lagi. “Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang lebih baik lagi,” harapnya.

Edi Damansyah berharap seluruh Kepala OPD, para *stakeholder*, pemangku kepentingan Camat, Lurah, Kades, dan masyarakat agar mengoptimalkan fungsi tugas pokok dengan baik, banyak-banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat bekerja pakai hati nurani, di mana ukurannya adalah rasa.

Edi Damansyah juga mengapresiasi dan bangga atas beberapa prestasi yang telah diraih oleh Pemkab Kukar namun janganlah membuat berpuas diri.

“Mudah-mudahan di tahun baru membuat kita lebih semangat lagi dalam bekerja dan berkarya. Dan kembali mengingatkan agar kita selektif terhadap pihak ketiga, jaga legalitas, jangan sampai pembayaran 100 persen tapi pekerjaan belum selesai serta teliti penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kukar. Tolong perhatikan laporan keuangan, data keuangan dan pastikan data sudah tersusun dengan baik dan sehingga Tim LKPD mudah untuk menyusun dan membantu laporan,” pinta Edi Damansyah. **(Prokom-03)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, "*Ngapeh Hambat*" Obrolan di Awal Tahun Pemkab Kukar Evaluasi APBD 2023 dan Persiapan APBD 2024, 05/02/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut:
  - (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
    - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
    - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
    - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
    - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang Undang ini meliputi asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

- f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
3. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 diatur sebagai berikut:
- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
  - (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundangan-undangan.